

DUNIA MELAYU: TANTANGAN DAN PROSPEKNYA DI MASA DEPAN

Maman S Mahayana

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

maman_s_mahayana@yahoo.com

ABSTRAK

Dunia Melayu dengan segala reputasinya di masa lalu dan tantangannya di masa depan sesungguhnya potensial merekatkan sentimen keserumpunan dalam lingkup wilayah yang sangat luas. Tetapi, di Indonesia, pandangan terhadap dunia Melayu, tidaklah seragam, mengingat Indonesia terbentuk dari keberagaman etnik, suku bangsa, dan bahasa. Tambahan lagi, dunia Melayu melintasi batas teritorial negara. Maka konsep keserumpunan itu sering kali disaputi persoalan politik negara bersangkutan. Jika sudah begitu, kepentingan nasional menjadi hal yang lebih utama dibandingkan persoalan dunia Melayu. Dalam konteks itu, penting artinya membuka peluang meningkatkan kesadaran keserumpunan melalui kesepakatan pemakaian bahasa resmi Asean. Itulah prospek dunia Melayu di masa depan yang implementasinya ternyata tidaklah sederhana. Penetapan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang diusulkan menjadi bahasa resmi Asean masih berupa wacana. Boleh jadi perlu wacana lain yang dapat disepakati bersama. Tulisan ini mencoba mengungkapkan kemungkinan disepakatinya bahasa resmi Asean.

Kata Kunci: melayu, tantangan, masa depan

ABSTRACT

The Malay world with all its reputation in the past and its challenges in the future actually has the potential to glue the sentiment of clump in a very wide scope of territory. However, in Indonesia, the view of the Malay world is not uniform, considering that Indonesia is formed from ethnic, ethnic, and linguistic diversity. In addition, the Malay world crossed the territorial boundaries of the state. So the concept of family is often followed by the political problems of the country concerned. If so, the national interest becomes more important than the problem of the Malay world. In that context, it is important to open up opportunities to increase family awareness through agreements on the use of asean official languages. That is the prospect of the Malay world in the future whose implementation turned out not to be simple. The designation of Malay or Indonesian proposed to become the official language of Asean is still a discourse. It may need another discourse that can be mutually agreed upon. This paper attempts to reveal the possibility of agreeing on the official language of Asean.

Keywords: malays, challenges, future.

PENDAHULUAN

Dunia Melayu di Indonesia disikapi secara beragam. Kadang kala terjadi benturan pandangan antara warga masyarakat Melayu sendiri yang merasa sebagai penduduk asli dari tradisi dalam lingkaran kebudayaan Melayu dan masyarakat non-Melayu yang juga (merasa) mempunyai sejarah panjang dengan tradisi agung budaya leluhurnya. Sudut pandang dan

perspektif yang berbeda dalam memposisikan dunia Melayu itu menentukan pemaknaan atas konsep Melayu. Oleh karena itu, dunia Melayu di Indonesia dapat diklasifikasikan atas dasar sudut pandang: (i) bahasa (ii) budaya, (iii) etnisitas, (iv) wilayah geografi, dan (v) politik.

Berdasarkan perspektif bahasa, dunia Melayu menerabas wilayah kultur etnik lain yang sangat luas dengan

sejarah panjang penyebarannya, peranannya, dan pengaruhnya. Penemuan sejumlah prasasti (batu bersurat) berbahasa Melayu kuno di wilayah-wilayah non-budaya Melayu menunjukkan bukti penyebarluasan bahasa Melayu itu terjadi dan diterima oleh masyarakat non-Melayu,¹ dan itu terjadi sebelum bangsa-bangsa Barat datang ke wilayah Nusantara. Adanya bahasa Melayu dialek-dialek setempat, seperti Melayu Banjar atau Melayu Betawi—sekadar menyebut dua contoh—yang kemudian membentuk bahasa sendiri, menegaskan bukti lain kuatnya pengaruh bahasa Melayu.

Dalam pandangan budaya, dunia Melayu adalah wilayah budaya yang dihuni kelompok etnik yang mengklaim mengusung budaya Melayu. Mengingat wilayahnya yang bertebaran begitu luas, maka konsep budaya Melayu di

dalamnya melekat budaya etnis masyarakat Melayu yang mendukung budaya itu. Meskipun demikian, klaim atas kemelayuan etnis—yang asli atau yang gado-gado—itu juga pada akhirnya mendatangkan masalah tersendiri ketika dihadapkan pada persoalan genealogi Melayu proto atau klaim sebagai bangsa Melayu asli.² Sebutlah beberapa di antaranya, seperti klaim dan penyebutan Melayu—Bugis, Melayu—Jambi, Melayu—Palembang, Melayu—Banjar, Melayu—Sambas, atau bahkan juga Melayu—Minangkabau.³

¹ Harimurti Kridalaksana (“Pengantar tentang Pendekatan Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia” dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 6—7) mencatat 18 prasasti berbahasa Melayu kuno. Selengkapnya ke-18 prasasti itu adalah berikut ini: (1) Prasasti Sojomerto (Pekalongan), (2) Prasasti Bukateja (Pubalingga, Banyumas), (3) Prasasti Dieng (Dieng), (4) Prasasti Sang Hyang Wintang I (Gandasuli, Temanggung), (5) Prasasti Sang Hyang Wintang II (Gandasuli), (6) Prasasti Dang Pu Hawang Glis (Gandasuli), (7) Prasasti Manjucirgha (Candi Sewu), (8) Prasasti Kebon Kopi, Bogor), (9) Prasasti Kedukan Bukit (Palembang), (10) Prasasti Talang Tuwo (Palembang), (11) Prasasti Telaga Batu (Palembang), (12) Prasasti Palembang (Palembang), (13) Prasasti Kota Kapur (Bangka), (14) Prasasti Karang Brahi (Jambi), (15) Prasasti Palas Pasemah (Lampung), (16) Prasasti Jebung (Lampung), (17) Prasasti Padang Roco (Sumatera Barat) dan (18) Prasasti Bukit Gombak (Sumatera Barat). Keterangan Harimurti ini sekaligus merevisi pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, (“Sejarah Bahasa Indonesia” dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *ibid.*, hlm. 97) yang menyebutkan bahwa prasasti Gandasuli di Jawa Tengah yang bertarikh 827 dan 832 Masehi merupakan prasasti Melayu tertua.

² Sekadar contoh, masyarakat suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau, misalnya, baik yang mengaku sebagai suku Talang Mamak Jalan Lama—yang masih mempertahankan secara ketat tradisi leluhur, maupun Talang Mamak Jalan Baru—yang sudah bersedia menjalankan syariat Islam, mengklaim sebagai Melayu proto mengingat begitu banyak kosa kata yang digunakan suku Talang Mamak berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan secara luas di masyarakat Riau. Kepala suku atau tetua adat—disebut juga batin, meyakini, bahwa mereka sebagai asli Melayu yang paling setia menjaga adat-istiadat leluhur. Apakah dengan begitu banyaknya perbedaan kosa kata Melayu Talang Mamak dan Melayu yang dipakai masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya, suku Talang Mamak sebagai Melayu proto? Jawabannya tentu perlu penelitian mendalam tentang masalah itu. (Wawancara dengan Dheni Kurnia, sastrawan Riau keturunan suku Talang Mamak, 3 Februari 2021).

³ Pada awal tahun 2000-an, di Padang diselenggarakan seminar kebudayaan Melayu. Salah satu hasil rumusan seminar itu adalah klaim bahwa kebudayaan Melayu berasal dari Minangkabau. Dalam seminar itu ditegaskan, bahwa Minangkabau sesungguhnya juga bagian dari dunia Melayu. Pada tahun 2008, Pusat Tamadun Melayu Universitas Indonesia juga mengadakan seminar bertajuk: “Kebudayaan Melayu—Bugis”. Dalam seminar itu, dibicarakan juga perkara suku bangsa Melayu yang masih keturunan Bugis. Beberapa raja dan tokoh Melayu di Johor, Selangor, dan Tanjungpinang, sesungguhnya juga masih keturunan Bugis. Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, sebagai keturunan Bugis, juga mengaku dirinya sebagai orang Melayu. Jadi, penamaan Melayu-Bugis lebih didasarkan keturunan darah, baik dari pihak ibu, maupun ayah.

Penyebutan ini boleh jadi untuk membedakannya dengan masyarakat Melayu yang mukim di kawasan Riau (Riau Daratan) dan Tanjungpinang (Riau Kepulauan). Sebagai wilayah budaya, dunia Melayu selain mencakup wilayah yang disebutkan tadi, juga melewati batas yang tidak tersekat oleh garis teritorial politik. Maka, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Pattani, Kamboja, Vietnam sampai ke Mindanao, sesungguhnya termasuk bagian dunia Melayu dalam konteks wilayah budaya.

Melayu dalam konteks etnisitas, cenderung ditempatkan dalam pengertiannya yang sempit, yaitu kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Maka yang dimaksud etnis Melayu adalah masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Riau (Daratan), Kepulauan Riau, sebagian Jambi, Palembang (Sumatra), Banjarmasin, dan Sambas (Kalimantan). Klaim yang sama berlaku pada etnis Melayu yang berada di luar wilayah Indonesia, seperti masyarakat Melayu Brunei, Singapura, dan Malaysia.⁴ Tetapi, belakangan, muncul penolakan atas penyempitan makna Melayu sebagai etnik. Penolakan itu didasari pemikiran, bahwa bangsa Melayu tidak hanya menyebarkan bahasanya sebagai *lingua franca* yang berperan penting sebagai bahasa perhubungan, perdagangan, diplomasi, dan persuratan, yaitu bahasa ilmu pengetahuan dan kesusastraan, tetapi juga menanamkan kebudayaannya. Bahasa Melayu sudah sejak lama menjadi bahasa kaum cerdik-pandai, para ulama, dan kaum intelektual. Mengingat kebudayaan dan bahasa

⁴ Di beberapa kota di Pulau Jawa, penyebutan etnis Melayu kerap digunakan juga secara salah kaprah. Melayu dimaksudkan juga sebagai pribumi untuk membedakannya dengan nonpribumi (masyarakat keturunan Tionghoa, Arab, dan India).

Melayu sejak lama menunjukkan peranannya yang reputasional, tidak pada tempatnya makna Melayu direduksi sebagai suku bangsa atau etnik. Dunia Melayu di dalamnya berkaitan erat dengan bangsa yang menghasilkan kebudayaan literasi dan peradaban tinggi.

Para pelaut asing, seperti I-tsing (671), Marco Polo (1292), Magellan (abad ke-16) sebagaimana yang dicatat Antonio Pigafetta (1522), merasa perlu membuat keterangan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa di kawasan Asia Tenggara yang penting dipelajari. Informasi itu menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah menjadi alat komunikasi antarbangsa. Oleh karena itu, bahasa Melayu perlu dipelajari oleh siapa pun yang hendak datang ke kawasan Asia Tenggara. Kajian mendalam Azyumardi Azra⁵ tentang jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17 dan ke-18 menunjukkan bukti, bahwa para ulama di Nusantara telah berhasil membangun peradaban agung lewat jalinan kerja sama yang luas dengan masyarakat mancanegara. Jaringan itu dimungkinkan oleh kemampuan dan penguasaan mereka dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Karya-karya intelektual yang dihasilkan para ulama itu hampir seluruhnya berbahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu, Jawi, atau Pegon,⁶ dan bahasa Arab.⁷

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

⁶ Periksa buku-buku yang membicarakan kekayaan khazanah kesusastraan Melayu (klasik), beberapa di antaranya, Liaw, Yock Fang, *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*, Jilid 1-2, Jakarta: Erlangga, 1991, 1993. Cetakan Pertama, Singapore: Pustaka Nasional, 1975; Teuku Iskandar, *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*, Jakarta: Libra, 1996; V.I. Braginsky, *Yang Indah*,

Dunia Melayu dalam pandangan kewilayahan (geografi), melintasi sejumlah negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura, sebagian Kamboja dan Vietnam. Dengan demikian, dunia Melayu dalam pengertian ini seolah-olah tersekat oleh batas teritorial politik (negara). Meskipun begitu, adanya semangat keserumpunan telah menjadikan masyarakat Melayu dalam kehidupan sehari-hari di kawasan itu sering menabrak batas-batas teritorial, terutama masyarakat Melayu—Pattani (Muangthai) yang berbatasan dengan Perlis dan Kelantan (Malaysia), masyarakat Melayu yang berada di jalur Sijori (Singapura, Johor—Melaka, Riau)

Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7—19, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998; Edi Sedyawati, dkk. (Ed.), *Sastra Melayu Lintas Daerah* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004). Buku-buku itu sesungguhnya menegaskan, bahwa bahasa Melayu, tidak hanya berhasil mengatasi dan sekaligus mempersatukan bahasa-bahasa etnik lain, dibandingkan bahasa Jawa atau Sunda, tetapi juga menjadi media bagi para ulama menghasilkan karya-karya intelektual yang berlimpah, berupa syair, pantun, hikayat, biografi, sejarah, dan seterusnya.

⁷ Naskah berbahasa Arab yang bertebaran di kesultanan-kesultanan di Nusantara, juga merupakan kekayaan tersendiri dunia literasi Nusantara. Sejauh ini, belum ada upaya untuk melakukan inventarisasi, dokumentasi, kodikologi, dan pencatatan naskah-naskah berbahasa Arab di Nusantara. Sekadar contoh, beberapa lemari yang tersimpan di Masjid Pulau Penyengat, menurut keterangan Raja Malik, salah seorang keturunan Raja Ali Haji, khusus menyimpan naskah-naskah berbahasa Arab yang ditulis sastrawan Riau seangkatan Raja Ali Haji. Sampai sekarang, naskah-naskah itu tetap tersimpan rapi dan belum tersentuh para peneliti (Wawancara dengan Raja Malik, 15 Juli 2019). Dapat kita bayangkan, berapa banyak masjid di seluruh Indonesia yang menyimpan naskah-naskah sejenis itu. Belum lagi yang tersimpan di pesantren-pesantren, termasuk di dalamnya, kitab-kitab kuning, hampir dapat dipastikan, belum tersentuh para peneliti.

dan di perbatasan Serawak.⁸ Dengan demikian, wilayah geografis dunia Melayu, berada melewati dan memasuki beberapa negara. Sekat politik itulah yang menempatkan masyarakat Melayu di kawasan-kawasan itu berkembang seiring dengan perjalanan sejarah negeri itu yang tidak terlepas dari perundang-undangan yang berlaku di negara-negara tersebut.

Berkaitan dengan pandangan kewilayahan, terutama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, pemaknaan dunia Melayu kadang kala disaputi oleh persoalan politik kepentingan bangsa (dan negara) bersangkutan dan perkara nasionalisme yang (mungkin) berlebihan. Hal itulah yang kadang kala menciptakan riak-riak yang dapat merenggangkan semangat keserumpunan. Oleh karena itu, konsep

⁸ Sentimen keserumpunan dan migrasi warga Indonesia yang telah berlangsung begitu lama menjadikan hubungan masyarakat di kawasan itu sering kali tidak terpengaruh konflik politik. Jika dicermati, terjadinya konfrontasi Indonesia—Malaysia pertengahan dasawarsa 1960-an, dalam praktiknya tidak mempengaruhi hubungan sosial budaya masyarakat di kawasan itu. Warga Batam atau Karimun; penduduk Rupert atau Bengkalis, ketika itu bisa seenaknya bolak-balik berbelanja batu es ke Singapura, Johor, atau Melaka, tanpa peduli apa yang sedang bergejolak di Jakarta. Mereka santai saja menyeberangi Selat Melaka dan kemudian diterima warga Malaysia, tanpa mereka ketahui bahwa Kuala Lumpur sedang bersitegang dengan Jakarta. Sirene tanda bahaya yang meraung-raung di beberapa kota di Pulau Jawa, yang menggambarkan Indonesia sedang menghadapi situasi darurat perang ketika itu, kenyataannya disikapi tenang-tenang saja oleh segenap penduduk di perbatasan kedua negara. Maka, persoalan yang terjadi dalam hubungan Jakarta—Kuala Lumpur, seperti tidak ada kaitannya dengan aktivitas penduduk di perbatasan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Batas teritorial dan persoalan politik kedua negara, tidak serta-merta memagari hubungan sosio-kultural penduduk yang bertahun-tahun lamanya hidup dan mengakar sebagai sentimen keserumpunan. Kesamaan perasaan sebagai warga puak Melayu itulah yang melekat-rekatkan sentimen persaudaraan penduduk di daerah itu.

Melayu tidak dapat diseragamkan begitu saja.

Dalam konteks itu, agak mengherankan, sejauh pengamatan, di Indonesia belum ada institusi pendidikan yang mempunyai pusat studi Melayu yang mencakupi wilayah-wilayah tersebut.⁹ Kajian Melayu hanya sebatas sebagai program studi Melayu,¹⁰ sama halnya seperti beberapa universitas yang menyelenggarakan program studi yang mengkhususkan studinya pada etnik atau masyarakat sukubangsa tertentu, seperti Prodi (bahasa dan sastra) Sunda, Jawa, Minangkabau, atau Bali. Dunia Melayu yang diperkenalkan di Indonesia seolah-olah hanya berkaitan dengan kesusastraan Melayu yang sudah dijadikan bahan pelajaran sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kajian-kajian tentang dunia Melayu cenderung terfokus pada khazanah kesusastraan—terutama naskah-naskah tertulis, kesenian, dan tradisi masyarakat Melayu yang berada di wilayah Indonesia.¹¹

⁹ Di Indonesia ada beberapa lembaga studi Melayu, di antaranya, Lembaga Kajian Melayu (Universitas Sumatera Utara, Medan), Pusat Penelitian Budaya Melayu (Universitas Riau, Pekanbaru), Pusat Tamadun Melayu (Universitas Indonesia, Depok—tidak aktif lagi), dan Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (Yogyakarta) yang diprakarsai Mahyudin Al Mudra. Lembaga-lembaga ini bukanlah bagian dari kajian wilayah atau pusat studi kewilayahan, seperti Kajian Wilayah Amerika, Kajian Wilayah Australia, Pusat Studi Jepang, atau Pusat Studi Timur Tengah, melainkan lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan budaya Melayu.

¹⁰ Di Universitas Riau dan Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, ada program studi (bahasa dan sastra) Melayu, tetapi bukan sebagai pusat studi yang wilayah kajiannya lebih luas.

¹¹ Sebagai contoh, sebuah buku berjudul *Sastra Melayu Lintas Daerah* (Editor: Edi Sedyawati, dkk.) (Jakarta: Pusat Bahasa, 2006, xxii + 419 Halaman) memuat sejumlah karya sastra (Melayu) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia,

Pusat Studi Melayu

Dunia Melayu sebagai puak kebudayaan, telah meninggalkan jejak sejarah yang penuh dengan mitos. Di sana, ada serangkaian kisah tentang keagungan sebuah komunitas etnis yang mendiami wilayah Semenanjung. Meskipun sejak Mei 1824, secara politik, kerajaan Melayu, termasuk di dalamnya masyarakat dan kebudayaannya, terbelah melalui Traktat London,¹² hubungan sosio-kultural masyarakat di kawasan itu tetap berjalan, tanpa merasa ada sekat-sekat politik yang memisahkannya. Perjanjian antara Inggris dan Belanda itu memang membagi dua kerajaan Riau–Lingga—Johor dan Pahang dalam wilayah

termasuk juga khazanah sastra Melayu yang berkembang di wilayah Brunei, Pattani, dan Mindanao, Filipina. Dalam buku itu diuraikan juga perjalanan kesusastraan Melayu sejak zaman Sriwijaya (Palembang), kesultanan Aceh sampai ke perkembangan mutakhir. Penekanannya terpusat pada kesusastraan Melayu dan tidak pada aspek lain yang meliputi dunia Melayu. Satu buku lain yang disusun Teuku Iskandar, *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad* (Jakarta: Libra, 1996, xxviii + 670 halaman) juga mencatat lebih luas khazanah kesusastraan Melayu di berbagai daerah di Nusantara sampai Johor, Singapura, dan Pattani.

¹² Penandatanganan Traktat London antara Inggris dan Belanda, 17 Maret 1824, jelas merupakan usaha membelah kedaulatan bangsa Melayu. Kerajaan Johor dan Riau dengan sendirinya terpecah: Kesultanan Johor berada di bawah kekuasaan Inggris dan Riau berada di bawah kekuasaan Belanda. Maka pada tahun 1830, Belanda menempatkan seorang residen di Tanjungpinang yang mewakili kekuasaan Belanda. Lebih daripada itu, Belanda juga menetapkan peraturan, bahwa dalam setiap penggantian tahta, sultan harus bersumpah setia kepada pemerintah Belanda. Dengan demikian, Belanda lebih mudah mengawasi Kerajaan Riau yang wilayah kekuasaannya makin menyusut. Belanda berhasil mengacaukan peran tradisional sejumlah kesultanan Melayu dan kesultanan lain di wilayah Nusantara. Tindakan itu yang tidak dilakukan Inggris di Semenanjung, sehingga beberapa kesultanan di wilayah itu tetap dapat memainkan peran tradisionalnya.

kekuasaan Inggris dengan sempadan Selat Singapura dengan kekuasaan Belanda di Bangkahulu (Sumatra Selatan). Akan tetapi hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan terus berlangsung melalui ikatan-ikatan tradisi yang berakar pada sentimen Melayu.

Secara politik, ada dua kekuasaan kolonial yang berbeda ketika itu, yaitu Inggris dan Belanda. Lalu ada batas-batas geografi yang memagari puak Melayu. Secara sosio-kultural, sekat politik itu tidak berlaku ketika mereka mengusung perilaku dan nilai budaya Melayu. Dalam hal ini, isu keserumpunan menjadi alat perekat dan puak Melayu secara sadar sengaja memanfaatkannya untuk menggugah emosi kemelayuan. Itulah yang terjadi dalam diri komunitas Melayu di kawasan Semenanjung ketika belum ada sekat-sekat wilayah politik kenegaraan. Maka, ketika balatentara Jepang menggantikan kekuasaan kolonial Inggris, 15 Februari 1942 di kawasan Semenanjung dan mengusir Belanda dari Pulau Jawa, 8 Maret 1942, keadaan itu makin mempererat hubungan kultural komunitas Melayu di kawasan itu.¹³

Malaysia yang membangun bangsanya lewat kebudayaan –dengan semangat Melayu yang menjiwainya—berhasil menempatkan negara itu dalam posisi sangat penting dalam hubungan sosial-politik-budaya di kawasan Semenanjung. Singapura yang selepas kerusuhan rasial memisahkan diri dari

Malaysia dan menjadi negara merdeka tahun 1965, berhasil pula mengangkat negeri bandar itu begitu kuat secara ekonomi. Brunei Darussalam yang merdeka 1 Januari 1984, telah menjadi negara terkaya di dunia. Di sana, masih ada masyarakat Melayu di Pattani (Muangthai) dan Mindanao (Filipina) yang berhadapan dengan problemnya sendiri. Sementara puak Melayu di kawasan Riau –Daratan dan Kepulauan—yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus meningkatkan kesadaran politik identitas kemelayuan sambil melakukan pembangunan sosio-budaya di tengah perubahan angin politik nasional yang sering tidak terduga.

Ada dua hal yang menjadi tali pengikat puak Melayu di kawasan ini. Pertama, kesadaran kultural kemelayuan. Kedua, kesadaran ideologi (keimanan) yang dianut mayoritas pendudukan di kawasan ini, yaitu agama Islam. Kedua hal itulah yang menjadi perekat yang secara emosional menumbuhkan semangat, sentimen, dan kesadaran kemelayuan. Bagaimana sentimen kemelayuan—yang kerap diberi label atas nama keserumpunan—bergerak menjadi semangat bersama membangun dunia Melayu. Lalu, bagaimanakah membangun kembali keagungan kebudayaan Melayu dalam situasi seperti itu? Bagaimana gagasan itu tidak sekadar romantika masa lalu, tetapi juga ada tujuan lain yang melatardepaninya?

Membangun Persepahaman

Sejarah telah mencatat bahwa usaha menyatukan puak Melayu lewat gerakan politik, selalu gagal lantaran di dalamnya ada kedaulatan negeri-negeri yang merdeka. Persoalannya tentu saja tidak gampang diselesaikan jika aspek politik menjadi pilihan. Kini, gerakan itu dipandang tidak realistik. Meskipun ada sekat politik yang berkaitan dengan

¹³ Adanya kesadaran sentimen keserumpunan ini pula yang kemudian melahirkan keinginan agar kawasan Semenanjung Melayu, Agustus 1945, bergabung ke dalam wilayah negara Indonesia Raya, menjelang berakhirnya Perang Dunia II dan terutama beberapa hari sebelum berakhirnya kekuasaan Jepang. Mengenai masalah ini, selengkapnya, periksa Maman S Mahayana, “Periode Pergolakan dan Pematangan; Menegaskan Jati Diri,” dalam *Akar Melayu: Ideologi dalam Sastra*, Jakarta: Buku Pop, 2010, hlm. 19—58.

kedaulatan negara, kesadaran kemelayuan tidak lagi diperlakukan sebagai kesadaran etnik, melainkan sebagai sebuah ras yang mendiami wilayah geografi yang sangat luas, mulai komunitas di kawasan Semenanjung, Pattani (Muangthai), Mindanao (Filipina) sampai ke wilayah Madagaskar dan Afrika Selatan. Itulah potensi dunia Melayu yang sangat boleh jadi akan mempertemukan kembali kesadaran keserumpunan puak Melayu.

Melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Melayu dewasa ini, terutama di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, ada kecenderungan untuk menempatkan problem kultural lebih signifikan dibandingkan problem politik dan ekonomi. Di Malaysia, misalnya, berpisahnya Singapura adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Ia harus diakui sebagai peristiwa masa lalu yang memang telah terjadi, meskipun sangat mungkin masih tersimpan luka sejarah. Oleh karena itu, mengangkat dan menumbuhkan isu-isu kemelayuan dengan semangat membangun kebesaran dunia Melayu menjadi wacana yang terus-menerus diembuskan sebagai salah satu usaha mengukuhkan kesadaran kebangsaan di Malaysia. Itulah sebabnya, identitas dan kebudayaan Melayu –dalam pengertian lebih luas ditempatkan sebagai kebudayaan rakyat asal rantau—menjadi prinsip utama konsep kebudayaan kebangsaan. Dalam hubungan itu, Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dalam hal ini, agama Islam menjadi salah satu identitas yang melekat dalam diri orang Melayu. Di dalamnya, termasuklah etnis lain di kawasan Semenanjung yang masuk agama Islam dan diterima sebagai Melayu.

Di Singapura, problemnya lain lagi. Masyarakat Melayu yang semula

sebagai mayoritas, tiba-tiba menjadi minoritas ketika berpisah dari Malaysia dan Singapura menjadi negara merdeka. Dengan populasi masyarakat Melayu yang berjumlah 14 % dari keseluruhan penduduk Singapura, proses pembentukan identitas dan kebudayaan Melayu di Singapura tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Masyarakat Melayu di Singapura harus merumuskan sendiri identitasnya dalam berhadapan dengan etnis lain. Meskipun demikian, adanya semacam hak istimewa masyarakat Melayu di Singapura sebagai penduduk pribumi, seperti tercantum dalam Perlembagaan Singapura, membuka kesadaran mereka bersaing secara sehat dengan etnik lain dalam memainkan peran sosialnya sebagai warga bangsa. Salah satunya melalui upaya merengkuh pendidikan setinggi-tingginya. Maka, bagi generasi muda Melayu—Singapura, kemelayuan tidak menjadi sentimen utama dalam konteks kebangsaan. Masa lalu adalah catatan sejarah dan masa depan adalah harapan yang mesti diperjuangkan berdasarkan kiprah di masa kini.¹⁴

¹⁴ Ketika saya menjadi pengajar tamu untuk semester pendek mata kuliah Pendidikan Sastera (*Literature Education*), 3—14 Juni 2018 di Nanyang Technological University, National Institute of Education, Asian Languages and Cultures Academic Group untuk calon guru sekolah Melayu Singapura, di luar waktu kuliah, saya berkesempatan mengobrol dan berdiskusi secara intens dengan 16 peserta kuliah itu. Sebagai orang Melayu yang akan menjadi guru di sekolah Melayu (Singapura), saya mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan konsep dan sentimen kemelayuan. Jawabannya sungguh mengejutkan: (i) pemerintah Singapura telah memberi banyak hal (fasilitas, kemudahan, dan kesejahteraan) bagi warganya. Maka, mereka harus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Singapura; (ii) mereka bersyukur, Tuhan telah menganugerahi Singapura sebagai negeri kecil, sehingga pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya secara baik; (iii) kesadaran sebagai “negeri kecil” justru menumbuhkan semangat untuk bersama-sama bagi setiap warga negara (Singapura) untuk

Bagi masyarakat Melayu Brunei, ada dua faktor utama yang memainkan peranan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu di Brunei Darussalam. Pertama, adat istiadat, dan kedua, agama Islam. Adat istiadat, di samping berfungsi sebagai salah satu alat untuk mempertahankan institusi raja, juga dalam kerangka menjunjung konsep taat-setia kepada raja sebagai "Yang Dipertuan". Kedudukan itu akan lebih terjamin, jika Islam menjadi agama resmi, dan sekaligus menjadi teras kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, identitas Melayu tak dapat dipisahkan, atau bahkan kemudian diidentikkan sebagai Islam.

Homogenitas masyarakat Melayu Brunei dengan Islam sebagai identitasnya menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara dan sekaligus juga ideologi negara. Mengingat adanya beberapa aliran dalam Islam, sultan lalu memilih Ahli Sunnah Wal-Jemaah ditempatkan menjadi ideologi negara. Lebih jauh dari itu, hasrat sultan dan rakyat negeri itu membawa dan menjadikan Brunei sebagai sebuah negara Islam yang menempatkan ajaran Islam sebagai dasar peraturan dan pegangan hidup masyarakat Melayu.

Di dalam Perlembagaan (undang-undang dasar) Brunei, dinyatakan juga bahwa negara menjamin rakyatnya bebas menganut dan mengamalkan agama lain. Kebebasan mengamalkan

menjaga stabilitas dan kerukunan bangsa; (iv) meskipun orang-orang Melayu di Singapura mempunyai pertalian sejarah dengan Malaysia, mereka memilih berpikir realistik. Singapura adalah pilihan yang paling realistik; (v) sebagai orang Melayu, mereka menyadari pentingnya kesadaran keserumpunan dan sentimen Melayu. Tetapi, ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu kesejahteraan. Jadi persoalannya bukan lagi perkara minoritas-mayoritas, tetapi sejauh mana Pemerintah memberi kebebasan dan kesejahteraan bagi warga Melayu Singapura.

agama lain itu tidak berarti bebas mengembangkan agama yang bersangkutan. Ada larangan yang ketat bagi penganut agama lain untuk mengembangkan agamanya. Tujuannya adalah agar kelangsungan agama Islam sebagai agama resmi negara, tetap terjaga, kokoh sebagai ideologi negara yang tidak tergoyahkan.

Demikianlah, kehidupan masyarakat Melayu di Brunei Darussalam cenderung berorientasi pada agama Islam, meskipun secara eksplisit, dalam perlembagaannya tidak disebutkan bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai landasan pemerintahan dan rujukan utama. Jadi, ada ruang yang dapat dimainkan adat negeri yang dalam hal ini tidak lain adalah adat istiadat Melayu. Dengan demikian, agama Islam dan adat istiadat, berjalan bergandengan. Atau, peri kehidupan masyarakat tetap berpegang pada ajaran agama Islam, meskipun perlembagaan tidak mencantulkannya.

Reputasi Bahasa Melayu

Dunia Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, tentu saja sangat berbeda dengan pengertian dunia Melayu sebagai etnis sebagaimana yang melekat dalam sebagian besar masyarakat Riau. Di sinilah, Riau yang pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu mempunyai posisi yang sangat strategis. Ia secara emosional, kultural, dan sosial, mempunyai ikatan tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks puak Melayu. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Riau dapat secara leluasa menjalin hubungan dengan masyarakat Melayu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, termasuk Pattani di Muangthai, meskipun ada sekat politik yang memisahkannya.

Dengan posisi Melayu Riau yang seperti itu, maka Riau dapat memanfaatkan isu kemelayuan sebagai

aset lokal, nasional, sekaligus regional. Jadi, atas nama kebudayaan Melayu, emosi kemelayuan dapat menjadi tali pengikat harapan dan cita-cita bersama, membangun kembali keagungan kebudayaan Melayu.

Di masa depan, kiprah yang telah dimainkan kebudayaan Melayu, tentu saja dapat terus dikembangkan dengan menjalin hubungan sosio-kultural dengan masyarakat Melayu serantau. Hanya dengan itu pula, harapan menempatkan kembali kebesaran dunia Melayu bukanlah sesuatu yang mustahil. Masalahnya kini tinggal bagaimana masyarakat Melayu sendiri menyadari dan berusaha mengangkat kembali kebesaran kebudayaannya, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Sentimen kemelayuan yang coba diangkat untuk kepentingan dan tujuan politik, sudah terbukti tidak lagi populer, dan bahkan hanya akan mengundang masalah yang jauh lebih kompleks. Jika sentimen keagamaan yang hendak diusung, juga akan menghadapi kendala yang pasti tidak sederhana. Bahkan, sangat mungkin hanya akan mengundang konflik internal terutama jika itu digunakan sebagai alat perjuangan bagi masyarakat Melayu di Riau, Singapura, Malaysia, mengingat heterogenitas kondisi keagamaan di ketiga wilayah itu. Apakah kemudian pilihannya jatuh pada sentimen kultural kemelayuan? Pertanyaan berikutnya –sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal— (1) ekspresi yang dapat dipahami bersama dan menjejawantah dalam bentuk bahasa; (2) ekspresi dalam bentuk perilaku, sikap, tata nilai, norma, etos kerja, tradisi, ideologi dan pandangan hidup masyarakat Melayu serumpun, atau (3) ekspresi dalam bentuk berbagai macam ragam kesenian yang hidup dan berkembang di kawasan Semenanjung Melayu?

Dari ketiga pertanyaan itu, tentu saja pilihannya jatuh pada butir pertama: bahasa! Bukankah bahasa Melayu telah sejak lama menjadi alat ekspresi, alat adaptasi sosial, alat komunikasi, dan sarana yang membuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam kerja sama? Mengapa bahasa? Inilah beberapa argumen yang melandasinya.

Pertama, sejak abad ke-15 bahasa Melayu telah memainkan peranan penting di wilayah Nusantara, tidak hanya untuk kepentingan komunikasi antarsuku bangsa pribumi, tetapi juga bagi para pelayar dari Eropa, khususnya Portugis dan Belanda. Catatan Francois Valentijn (*Beschrijvinghe van Batavia*, 1726) menyebutkan, bahwa bahasa Melayu tidak hanya dipakai penduduk di Batavia, tetapi juga di seluruh Hindia Belanda, bahkan sampai negeri Parsi. Itulah sebabnya, Valentijn menyarankan agar kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara diikuti juga oleh usaha memperkenalkan bahasa Belanda kepada penduduk pribumi agar dapat bersanding dengan bahasa Portugis yang lebih dahulu disebarkan dan bahasa Melayu yang sudah menjadi alat komunikasi yang paling luas penyebarannya.¹⁵

Sampai sekarang, dibandingkan dengan bahasa etnis yang lain, bahasa Melayu –yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan Malaysia, Brunei Darussalam, dan menjadi salah satu bahasa kebangsaan di Singapura— termasuk bahasa yang paling luas penyebarannya dan paling besar jumlah

¹⁵ Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600—1950*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995. Lihat juga Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius, 1991. Sutan Takdir Alisjahbana, “Bahasa Indonesia,” *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933, hlm. 150.

penuturnya. Bukankah itu merupakan sebuah ikon yang sejak lama menjadi milik bersama, dikenal dan dipahami secara luas, dan menjadi sarana ekspresi, komunikasi, kerja sama, dan kerangka berpikir masyarakat Nusantara. Itulah potensi besar yang membuka jalan bagi usaha mengangkat martabat Melayu?

Kedua, masih berdasarkan catatan Francois Valentijn (*Beschrijvinghe van Amboina, 1724*) tentang bahasa Melayu, disebutkan bahwa “bahasa ini indah, bagus sekali, merdu bunyinya, dan kaya, yang disamping bahasa Portugis, merupakan bahasa yang dapat dipakai di seluruh Hindia, sampai ke Parsi, Hindustan, dan negeri Cina... Bahasa Melayu hampir menjadi bahasa Latin atau bahasa Perancis di Eropa.” Jika orang-orang Eropa sudah sejak lama begitu kagum kepada bahasa Melayu, lalu mengapa pula kini kita tidak merasa bahwa bahasa Melayu sesungguhnya merupakan kekayaan kultural yang dapat membanggakan warga puak dan bangsanya sendiri.

Ketiga, penelitian mendalam yang dilakukan Kees Groeneboer (1995) tentang bahasa Belanda di Hindia Belanda (1600—1950) menyebutkan, bahwa sudah sejak tahun 1600-an tarik-menarik pengaruh antara bahasa Portugis, Belanda, dan Melayu, justru pada akhirnya mengangkat bahasa Melayu ke taraf tertinggi.¹⁶ Dalam sistem pengajaran dan pemakaiannya dalam birokrasi pemerintahan kolonial, pemaksaan penggunaan bahasa Belanda, terbukti selalu mendatangkan kegagalan.¹⁷ Maka pilihan terbaik jatuh

pada bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu selalu menjadi pilihan terbaik dibandingkan bahasa Belanda, Portugis, atau bahasa-bahasa etnik lain yang ada di Nusantara?

Secara linguistik, bahasa Melayu adalah bahasa yang begitu terbuka menerima unsur bahasa asing. Dengan demikian, ia berkembang dan terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, secara gramatika, bahasa Melayu cenderung mudah, tidak *njlimet* (rumit), dan luwes, lantaran sifatnya yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika secara sosiologis bahasa Melayu sudah sejak lama menjadi *lingua franca* di wilayah Nusantara, maka sesungguhnya bahasa Melayu sangat potensial menjadi bahasa resmi di kawasan ini.

Adanya kerja sama kebahasaan yang sudah berlangsung beberapa lama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta kerja sama dalam berbagai bidang kebudayaan masyarakat Melayu serumpun, tentu saja merupakan langkah yang baik bagi terbukanya peluang menjadikan bahasa Melayu –atau bahasa apa pun namanya—sebagai bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya: mengapa kerja sama kebahasaan yang berlangsung beberapa tahun lamanya itu sampai sekarang belum juga membuahkan kesepakatan mengenai pemakaian bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara, atau paling tidak, bahasa resmi di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?

¹⁶ Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600—1950*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995.

¹⁷Lihat Maman S Mahayana, “Perkembangan Bahasa Indonesia—Melayu di Indonesia dalam Konteks Sistem Pendidikan,” Makalah Seminar

Internasional Bahasa dan Sastra Indonesia--Melayu, kerja sama Universitas Pakuan, dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bogor, Universitas Pakuan, Bogor, 14-16 September 2002. Dimuat dalam Jurnal *Insania*, STAIN Purwokerto, Vol. 14, No. 3, September—Desember 2009, hlm. 395—424.

Keempat, sejarah mencatat, pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia, tidak hanya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi negara, tetapi juga sebagai bahasa yang berhasil menanggalkan fanatisme etnik dan kedaerahan serta mampu menumbuhkan semangat persatuan keindonesiaan. Jadi, ia berperan sebagai salah satu alat persatuan bangsa, sebagaimana tersurat dalam butir ketiga teks Sumpah Pemuda: “ ... *menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*”

Kelima, sebagaimana dikatakan dalam pepatah lama: “Bahasa mencerminkan bangsa!” itu berarti perilaku dan sikap budaya suatu masyarakat tercermin pula dari bahasa yang digunakannya. Jika memang dunia Melayu hendak dikembangkan dan kita coba menggali potensi-potensinya, maka tidak dapat lain, salah satu sarananya dapat dilakukan melalui bahasanya, bahasa Melayu. Ia pada akhirnya tidak sekadar mengangkat martabat dan marwah Melayu, tetapi juga mengangkat martabat bangsa secara keseluruhan.

Wacana Bahasa Resmi Asean

Begitulah perjalanan panjang riwayat bahasa Melayu menegaskan kepada kita tentang kedudukan, martabat, dan reputasi bahasa Melayu yang tidak dapat tergantikan, baik oleh bahasa daerah mana pun, maupun oleh bahasa asing, terutama Belanda dan Inggris. Melihat jumlah penuturnya (bahasa Indonesia dan bahasa Melayu)¹⁸

¹⁸James T. Collins, (*Bahasa Melayu, Bahasa Dunia: Sejarah Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 104) mencatat, bahwa jumlah penutur bahasa Melayu yang fasih sekarang ini, baik sebagai bahasa pertama, maupun sebagai bahasa kedua, diperkirakan 150—200 juta di seluruh dunia. Menurut Collins, pada tahun 2020, jumlah penutur bahasa Melayu di seluruh dunia mencapai 300 juta orang. Jadi, sekarang jumlah

yang begitu besar dan penyebarannya yang begitu luas, maka bahasa Melayu (atau bahasa Indonesia) potensial menjadi bahasa antarbangsa, setidaknya tidaknya berlaku di kawasan Asia Tenggara sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama di bidang bahasa dan sastra antarnegara di kawasan Asia Tenggara, mutlak diperlukan guna mewujudkan harapan itu. Perhatikan kutipan James T. Collins (2005: 103-104) berikut ini:

Ketiga negara ini (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: msm), telah aktif mempromosikan bahasa Melayu sebagai suatu fenomena internasional dan berusaha menarik komunitas penutur bahasa Melayu di Thailand, Sri Langka, Australia, Kamboja, dan penutur bahasa Melayu di Afrika Selatan yang lebih dekat dengan arus utama pembangunan budaya dan ekonomi penutur bahasa Melayu di Asia Tenggara.

Dilihat dari aspek sejarah, sosiologi, linguistik, sastra dan budaya, tidak ada alasan untuk menolak usulan (dan harapan) bahasa Melayu (atau bahasa Indonesia) menjadi bahasa resmi kedua—setelah bahasa Inggris yang digunakan di negara-negara Asean. Langkah berikutnya adalah bagaimana bahasa Melayu (atau bahasa Indonesia) menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berkaitan dengan usulan bahasa resmi Asean, muncul dua wacana yang kini berkembang. Pertama, memilih bahasa Melayu sebagaimana yang diusulkan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Ismail Sabri Yakoob dalam

penutur bahasa Melayu (atau bahasa Indonesia) sudah mencapai lebih dari 300-an juta.

pidatonya di Istana Negara di depan Presiden Joko Widodo (1/4/2022). Wacana ini mendapat sambutan dan dukungan luas masyarakat Melayu di kawasan Semenanjung yang menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Kedua, memilih bahasa Indonesia, dan bukan bahasa Melayu. Alasannya: (i) perkembangan pesat bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia lebih maju dan kosa katanya lebih kaya. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia lebih leluasa menyerap kosa kata bahasa asing dan bahasa etnik, di luar bahasa Melayu sebagai asal dan dasar bahasa Indonesia;¹⁹ (ii) bahasa Indonesia dipelajari di berbagai universitas dan institusi di mancanegara; (iii) pengangkatan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mengatasi sentimen etnik dan berbagai keberagaman yang melekat pada suku-suku bangsa di Indonesia; (iv) pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Asean, tidak berarti hendak mengubur sejarah panjang keagungan puak Melayu dan reputasi bahasa Melayu; (v)

¹⁹ Pernyataan bahasa Indonesia lebih maju dengan kosa kata yang lebih kaya daripada bahasa Melayu dimungkinkan oleh beberapa faktor berikut: (i) kosa kata etnik atau yang berasal dari bahasa daerah yang dianggap sudah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia dapat diserap sebagai bahasa Indonesia, misalnya, *ngaben*, *subak* (Bali), *siri* (Bugis), *carok* (Madura), *koteka* (Papua); (ii) pengindonesiaan berbagai istilah keilmuan yang dimulai sejak zaman Jepang sampai sekarang, telah menghasilkan ribuan istilah bahasa Indonesia; (iii) pengindonesiaan berbagai istilah atau kata dari bahasa asing; (iv) pencatatan kosa kata Melayu yang hidup di masyarakat, tetapi belum tercatat dalam kamus bahasa Indonesia; (v) pencatatan ungkapan atau kosa kata baru yang hidup di masyarakat, baik yang diambil dari bahasa daerah, seperti *keukeuh*, *ngeyel*, *ngotot*, *ger*, *greget*, dan seterusnya, maupun kata atau akronim hasil bentukan baru, misalnya, berdikari, sinetron, vigim, drakor, baper, dan seterusnya.

peristiwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagaimana tertuang dalam butir ketiga Sumpah Pemuda, tidak hanya menumbuhkan semangat persatuan Indonesia, tetapi juga sebagai pemantik yang melahirkan konsep Indonesia yang dibayangkan: bertanah air, berbangsa, dan menjunjung bahasa persatuan.

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, adalah salah satu titik berangkat perjuangan kemerdekaan Indonesiaan, 17 Agustus 1945. Dapat dipahami jika dalam UUD 1945, Pasal 36, tercantum pernyataan, "Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia" yang menegaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa heterogen yang multietnik yang memiliki ratusan bahasa daerah. Pengangkatan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia merupakan keputusan politik, tetapi berkat keputusan politik itu pula Indonesia punya konsep tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan yang menjadi cikal bakal penamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukankah ketika itu (28 Oktober 1928) Indonesia sebagai sebuah negeri (tanah air) dan bangsa yang merdeka, belum ada, belum wujud?²⁰ Atas peranan dan fungsi bahasa Indonesia itu pula salah satu pertimbangan dicantumkannya

²⁰ Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan J.R. Logan (1850). Adolf Bastian dalam buku *Indonesien* (1884) mempopulerkannya sebagai bangsa yang mendiami wilayah *indos* 'India' dan *nesos* 'pulau'. Artinya, Indonesia adalah sebuah wilayah (dan bangsa) yang mendiami gugusan pulau(-pulau). Pulau-pulau itulah yang dikenal sebagai wilayah Nusantara. Jadi, secara *de facto*, wilayah Indonesia memang sudah ada sejak entah kapan. Tetapi, secara *de jure*, wilayah itu berada di bawah penguasaan bangsa asing (Belanda). Pertanyaannya: apakah kini kita perlu menolak nama Indonesia lantaran yang mula mempopulerkannya bangsa asing?

bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945!²¹

Tarik-menarik antara bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang hendak dipilih dan ditetapkan sebagai bahasa resmi Asean—setelah bahasa Inggris, dalam kenyataannya, cukup problematik. Tarik-menarik itu tidak terlepas dari persoalan yang melatarbelakanginya, yaitu (i) sejarah panjang bahasa Melayu dengan penyebarannya yang luas, jumlah penuturnya yang signifikan, kuatnya sentimen kemelayuan, dan reputasinya sebagai bahasa antarbangsa, (ii) sejarah kelahiran bahasa Indonesia yang berfungsi dan berperan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang heterogen dan multietnik.²² Oleh sebab itu, posisi bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkara nasionalisme Indonesia. Perkara nasionalisme yang melekat pada bahasa Indonesia itulah yang tidak terjadi di banyak negara yang kelahiran bahasa nasionalnya berkaitan dengan kemerdekaan bangsa.

Jika bercermin pada peristiwa Kongres Pemuda Pertama, 1926, yang gagal ketika hendak merumuskan bahasa persatuan Indonesia—yang ketika itu Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu, maka

²¹ Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini memang unik. Bagaimana mungkin kelahiran sebuah bahasa seketika mengatasi bahasa-bahasa yang sudah mempunyai sejarah panjang? Tetapi, keputusan politik sudah menetapkan demikian dan faktanya, justru lantaran adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, konflik etnik dan persoalan disintegrasi relatif dapat dihindarkan.

²² Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2015), Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dengan 14 bahasa daerah yang penuturnya berada di atas satu juta jiwa. Dengan kehadiran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sentimen kedaerahan lesap dalam semangat persatuan Indonesia. Itulah sebabnya, Indonesia menamakan negaranya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

tarik-menarik bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang hendak ditetapkan sebagai bahasa resmi Asean, agaknya tetap akan menghadapi kendala: (1) Indonesia tegas tidak dapat menerima pilihan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Asean mengingat pertimbangan historis dan nasionalisme yang berkaitan dengan fungsi dan peranan bahasa Indonesia sebagai negara; (2) Malaysia dan Brunei Darussalam tetap memilih bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Asean, dan bukan bahasa Indonesia, juga atas pertimbangan historis dan reputasinya sebagai bahasa antarbangsa.

Atas pertimbangan itu, bolehlah kiranya diperlukan skenario lain yang mungkin dapat diterima berbagai pihak, yaitu mengusulkan nama baru yang di dalamnya merepresentasikan akar bahasa nasional negara-negara Asean! Dengan langkah politik, terutama menetapkan bahasa resmi Asean, jalan lempang terbuka menuju harapan ideal membangun kebesaran dunia: tamadun Melayu.

Rekomendasi

1. Perlu menciptakan nama (bahasa) baru, misalnya, bahasa Nusantara, yang asal dan dasarnya dari bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei, dengan tetap mempertimbangkan perluasan dan penambahan kosa kata baru sesuai tuntutan dan perkembangan zaman.
2. Perlu menanggalkan snobisme, primordialisme, dan sikap nasionalisme yang berlebihan demi kepentingan bersama.
3. Perlu kesadaran bersama, bahwa dengan “lahirnya” bahasa baru, bahasa Melayu tidak akan hilang di bumi.
4. Perlu tindakan bersama untuk mendesak pemerintah masing-

masing punya keinginan politik mewujudkan (i) kesepakatan bersama penamaan bahasa baru yang digunakan di kawasan Asean; (ii) mengubah atau menambah keputusan pemakaian bahasa Inggris dalam pertemuan kenegaraan tingkat Asean.

5. Perlu kesepakatan bersama dan keputusan politik pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura—jika mungkin juga pemerintah Thailand, Filipina, Timor Leste, Kamboja, dan Vietnam untuk menetapkan bahasa resmi Asean, apa pun nama bahasanya!

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shaghir. "Karya-Karya Klasik Abad 16: Bukti Bahasa Melayu Bahasa Ilmu." *Jurnal Dewan Bahasa*, Februari 1990.

Albach, Philip G. and Gail P. Kelly (Eds.) *Education and Colonialism*. New York: Longman, 1978.

Alisjahbana, Sutan Takdir, "Pengadjaran Bahasa" *Poedjangga Baroe*, No. 2, Th. I, Agoestoes 1933.

----- "Bahasa Indonesia." *Poedjangga Baroe*, No. 5, I, November 1933.

----- "Soal Bahasa dalam Sekolah Kebangsaan" *Poedjangga Baroe* No. 10, Th. I, April 1934, hlm.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Braginsky, V.I. *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7—*

19, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998

Collins, James T. *Bahasa Melayu, Bahasa Dunia: Sejarah Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2005.

Darmawidjaja. "Tentang Bahasa." *Poedjangga Baroe*, No. 12, Th. I, Djoeni 1934.

Groeneboer, Kees. *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600—1950*,

Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995.

Iskandar, Nur St. "Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia." *Pustaka*

dan Budaja, No. 8, Th. II, 1960. E.

Ulrich Kratz (Peny.). *Sumber Terpilih Sejarah*

Sastra Indonesia Abad XX.

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.

Iskandar, Teuku. *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*, Jakarta: Libra, 1996

Jamin, Muhammad. *Sumpah Indonesia Raja*. Bukit Tinggi: Nusantara, 1955.

Dimuat juga

dalam E. Ulrich Kratz. (Peny.).

Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad

XX. Jakarta: Kepustakaan Populer

Gramedia, 2000.

Kridalaksana, Harimurti (Ed.). *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*.

Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Liaw, Yock Fang, *Sejarah Kesusastraam Melayu Klasik*, Jilid 1-2, Jakarta: Erlangga, 1991,

1993. Cetakan Pertama,

Singapore: Pustaka Nasional, 1975.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Maman S Mahayana

Dunia Melayu: Tantangan dan Prospeknya di Masa Depan

Mahayana, Maman S. *Akar Melayu: Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.

----- . *Bahasa Indonesia Kreatif*. Jakarta: Penaku, 2015.

----- . "Perkembangan Bahasa Indonesia—Melayu di Indonesia dalam

Konteks Sistem Pendidikan," *Jurnal Insania*, STAIN Purwokerto, Vol. 14, No. 3,

September—Desember 2009, hlm. 395—424.

----- . "Memartabatkan Citra dan Kedaulatan Bahasa Melayu di Persada

Dunia" Kertas Kerja Persidangan antarbangsa Bahasa Melayu

2021, Faculty of Social Sciences and Humanities UTM Johor Bahru, Malaysia, 14—15 November 2021

Moain, Amat Juhari. "Sejarah Tulisan Jawi." *Jurnal Dewan Bahasa*, November 1991.

Nagazumi, Akira. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Niel, Robert van. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Sedyawati, Edi, dkk. (Ed.), *Sastra Melayu Lintas Daerah* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004

Wawancara dengan Dheni Kurnia, 3 Februari 2021.

Wawancara dengan Raja Malik, 15 Juli 2019.